

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Suatu organisasi pada umumnya memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keadaan keuangan yang terjadi pada organisasi tersebut selama satu periode pelaporan. Organisasi yang menyusun pelaporan keuangan bukan hanya organisasi yang bergerak di sektor privat saja, organisasi yang bergerak di sektor publik juga melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Suatu sistem pemerintahan juga termasuk sebagai organisasi yang bergerak di sektor publik sehingga melakukan penyusunan pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pelaporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, berarti dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas

pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) Yuliani dan Agustini (2015).

Walaupun opini dari BPK yang didapat provinsi Yogyakarta saat ini sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi masih terdapat beberapa catatan untuk opini tersebut. Salah satunya yaitu pengelolaan aset tetap daerah yang masih belum tercatat dengan baik dan semestinya yang terjadi dilapangan. Fakta yang terjadi dilapangan nilai aset sudah banyak yang berubah, jadi harus melakukan pengecekan kembali agar nilai aset tercatat dengan baik.

Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyediakan informasi keuangan secara jujur dan transparan kepada masyarakatnya serta akan menjadi pelaporan keuangan yang berkualitas. Terdapat beberapa kekayaan milik daerah, salah satunya adalah aset daerah, ada dua jenis aset yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan seperti kas, piutang, serta surat surat berharga. Aset non keuangan salah satunya adalah aset tetap (Febrianti, 2016).

Kolinug, dkk (2015) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang andal salah satunya adalah melalui pengelolaan aset milik daerah, pemerintah daerah harus mengelola aset dengan baik, aset tetap milik daerah merupakan upaya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset serta

melalui hal ini dapat mendukung fungsi dan peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk masyarakatnya. Selain itu juga menjadi langkah awal pemerintah daerah melakukan pengembangan kemampuan di bidang keuangan.

Masalah yang ada dalam hal aset daerah salah satunya adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Sebagai dampak dari masalah yang ada pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah aset yang dikuasai atau dikelolanya hal ini menurut Antoh (2017). Sehingga menyebabkan masalah di dalam pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap milik daerah, seperti yang dinyatakan Sugjama (2013) inventarisasi aset merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi dari aset berwujud maupun aset tidak berwujud, Inventarisasi aset dilakukan pada waktu tertentu. Sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset untuk mengetahui informasi dari seluruh aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh suatu daerah. Seluruh aset yang dimiliki oleh suatu daerah perlu diinventarisasi baik yang diperoleh dari investasi, hibah ataupun diperoleh dari yang lainnya. Penelitian terdahulu Trisnani, dkk (2017) menyatakan penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan artinya semakin baik pelaksanaan penatausahaan aset tetap akan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Pengelolaan aset tetap milik daerah tersebut jika dilakukan melalui inventarisasi yang baik juga harus diiringi dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik juga, maka dari itu di dalam instansi pemerintah sangat diperlukan SPI yang dapat menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan di instansi pemerintah khususnya dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Widari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-nisa' Ayat 58,

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Selain Inventarisasi aset tetap dan SPI dalam menjalankan kegiatan didalam pemerintahan, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik untuk membantu menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas serta yang menjalankan sistem pengendalian intern supaya berjalan dengan baik. Armel (2017) menyatakan sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkompeten mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Armel (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Jika sudah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, untuk dapat mendukung hal tersebut perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi. Penjelasan peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membagikan informasi keuangan kepada pelayanan publik yaitu semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Penelitian terdahulu Armel (2017) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sedangkan pemilihan variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dipilih dengan alasan SAP tersebut berisi aturan atau prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemahaman pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SAP merupakan faktor penting baik untuk meningkatkan kualitas atau pembuatan pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu Wiraputra, dkk (2014) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari organisasi atas kewajiban-kewajiban yang telah dilakukannya. Jadi, pemerintah daerah semestinya harus melaporkan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi (2017), jika akuntabilitas dikelola dengan baik, maka hal itu akan menghasilkan akuntabilitas yang baik dan juga berkualitas sehingga dalam proses pelaporan keuangan, bisa menjadi pelaporan keuangan yang baik dan juga bisa disajikan kepada publik. Ermino (2017) pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Setelah itu yaitu transparansi, disini transparansi merupakan keterbukaan suatu informasi. Pada dasarnya masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi, mengenai apa yang dilakukan pemerintah dan mengapa program atau suatu kebijakan tersebut dijalankan, dengan mengetahui program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka, masyarakat dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu Aswadi (2014) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Purnamawati dan Sujana (2015) dan penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017). Perbedaan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Purnamawati dan Sujana (2015) dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel pengelolaan inventarisasi aset tetap, akuntabilitas

dan transparansi. Penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017) yang menjadi acuan karena salah satu hal yang paling berpengaruh didalam pelaporan keuangan adalah aset, selain itu juga studi kasus yang dilakukan di penelitian sebelumnya adalah di kecamatan Buleleng sedangkan penelitian ini studi kasus pada organisasi perangkat daerah Provinsi Yogyakarta.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Inventarisasi Aset Tetap berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?
5. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?
6. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?

7. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas Pelaporan Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh positif inventarisasi aset tetap daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan.
2. Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan.
3. Pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan.
4. Pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan.
5. Pengaruh positif pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan.
6. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan.
7. Pengaruh positif transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Setelah penelitian dilakukan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan untuk kemajuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan inventarisasi aset tetap milik daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas serta transparansi dalam memengaruhi kualitas pelaporan keuangan terutama bagi daerah dilokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

